



Pemerintah
Kabupaten Pangandaran

2026



RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Jalan Raya Parigi No. 180 Dusun Kemplung Desa Karangbenda



<https://dinsospmd.pangandarankab.go.id/>



dinsospmd.pangandaran@gmail.com



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

*Jl. Raya Parigi, No. 180 RT 03/RW 04, Dsn. Kemplung, Desa Karangbenda,
Kec. Parigi, Kab. Pangandaran - 46393*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA**

KABUPATEN PANGANDARAN

Nomor : 050/Kpts.015/DINSOSPMD/2025

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2026**

KEPALA DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 356 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2026;
- b. bahwa Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 24), Renstra DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran

tentang Pengesahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

25. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
26. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406

- Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 37. Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045;
 43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
 44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
 45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
 47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 24);
 48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 26);
 49. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 050/Kpts. 006.a/DINSOSPMD/2025 Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinsospmd Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029;

50. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 050/Kpts.015/DINSOSPMD/2025 Tentang Pengesahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra DINSOSPMD adalah dokumen perencanaan PERANGKAT DAERAH untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
3. Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja DINSOSPMD adalah dokumen perencanaan DINSOSPMD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

SISTEMATIKA RENJA

Pasal 2

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V. PENUTUP

BAB III

ISI DAN URAIAN RENJA

Pasal 3

Isi beserta uraian Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Rencana Kerja (Renja) DINSOSPMD Tahun 2026 dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) DINSOSPMD Tahun 2026.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala DINSOSPMD ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala DINSOSPMD.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 23 Juli 2025

**a.n Bupati Pangandaran
KEPALA DINSOSPMD
KABUPATEN PANGANDARAN**

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Pangandaran government. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN". Inside the ring is a smaller emblem featuring a shield with a sun, a star, and a banner. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Drs. TRISNO".

Drs. TRISNO

Tembusan :

Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Pangandaran



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR: PR.04.02/ Kpts. 294 -Huk/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa untuk memastikan penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan baik dan sistematis serta selaras dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, perlu dilaksanakan oleh suatu tim;
- c. bahwa berdasarkan Lampiran huruf B.1.1.b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dipersiapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
 15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2017 Nomor 53);

16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor: 050/1333-Bappeda.2, tanggal 26 November 2024, Hal: Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data dan informasi;
- b. menyusun dokumen rancangan awal Renja Tahun 2026;
- c. menyusun dokumen rancangan Renja Tahun 2026;
- d. menyusun dokumen rancangan akhir Renja Tahun 2026;
- e. menyusun dokumen rancangan awal Tahun 2027;
- f. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- g. menyusun dokumen perubahan Renja tahun 2025;
- h. melakukan Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
- i. melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Bupati.

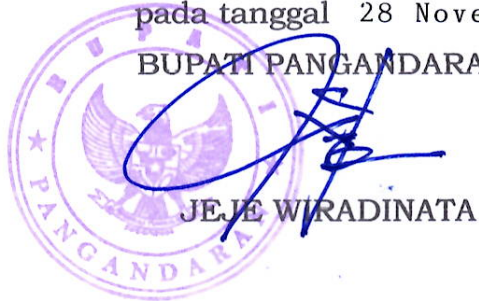
KETIGA : Rincian Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 28 November 2024

BUPATI PANGANDARAN,



JEJE WIRADINATA

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pangandaran;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR : PR.04.02/ Kpts. 294 -Huk/2024

TANGGAL : 28 November 2024

SUSUNAN PERSONALIA

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Pengarah : 1. Bupati Pangandaran;
2. Wakil Bupati Pangandaran.
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
- III. Koordinator : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
3. Asisten Administrasi Umum.
- IV. Perangkat Daerah
 - A. Sekretariat Daerah
 - 1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
 - 2. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum.
 - 3. Kelompok Kerja : 1. Unsur Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
2. Unsur Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah;
3. Unsur Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah;
4. Unsur Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Daerah;
5. Unsur Pegawai pada Sekretariat Daerah.
 - B. Sekretariat Dewan
 - 1. Ketua : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran.
 - 2. Sekretaris : Kepala Bagian Umum dan Keuangan.
 - 3. Kelompok Kerja : 1. Kepala Bagian Persidangan dan Perundangan-Undangan;
2. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
4. Fungsional Perencana;
5. Para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
6. Staf Perencanaan.
 - C. Inspektorat
 - 1. Ketua : Inspektur.
 - 2. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat.

3. Kelompok Kerja : 1. Inspektur Pembantu I;
2. Inspektur Pembantu II;
3. Inspektur Pembantu III;
4. Inspektur Pembantu Khusus;
5. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum;
6. Para Pengendali Teknis JFA dan PPUPD;
7. Para Ketua Tim JFA dan PPUPD;
8. Staf Perencanaan.

D. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kelompok Kerja : 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam & Kelitbangan;
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
5. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan;
6. Penelaah Teknis Kebijakan di Sub Bagian Program dan Keuangan.

E. Badan Keuangan dan Aset Daerah

1. Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Sekretaris : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Kelompok Kerja : 1. Kepala Bidang Anggaran;
2. Kepala Bidang Akuntansi;
3. Kepala Bidang Aset;
4. Kepala Bidang Pembendaharaan;
5. Fungsional Perencana.

F. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Kelompok Kerja : 1. Kepala Bidang Pengadaan, Pengembangan Kompetensi dan Informasi;
2. Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir;
3. Kepala Bidang Disiplin dan Kinerja;
4. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan;
5. Penelaah Teknis Kebijakan.

G. Badan Pendapatan Daerah

1. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah
2. Sekretaris : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
3. Kelompok Kerja :
 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
 2. Kepala Bidang BPP-P2 dan BPHTB;
 3. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya;
 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

H. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

1. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
3. Kelompok Kerja :
 1. Kepala Bidang Pembinaan SD;
 2. Kepala Bidang Pembinaan SMP;
 3. Kepala Bidang Pembinaan PAUD/PNF;
 4. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga;
 5. Analisis Perencanaan.

I. Dinas Kesehatan

1. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan.
3. Kelompok Kerja :
 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;
 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat;
 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 5. Kasubag Program dan Keuangan.

J. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
3. Kelompok Kerja :
 1. Kepala Bidang Bina Marga;
 2. Kepala Bidang Sumber Daya Air;
 3. Kepala Bidang Tata Ruang;
 4. Kepala Bidang Cipta Karya;
 5. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.

K. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Kelompok Kerja :
 1. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas;

2. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
3. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
4. Penelaah Teknis Kebijakan;
5. Operator Perencanaan.

L. Satuan Polisi Pamong Praja

1. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Kelompok Kerja :
 1. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 2. Kepala Bidang Penertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 3. Kepala Bidang Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran;
 4. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.

M. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

1. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
3. Kelompok Kerja :
 1. Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup;
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
 3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup;
 4. Kasubag Program dan Keuangan.

N. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Kelompok Kerja :
 1. Semua Kepala Bidang;
 2. Semua Kasi dan Kasubag;
 3. Semua Fungsional Umum;
 4. Operator Perencanaan;
 5. Operator Keuangan;
 6. Operator Barang Milik Daerah.

O. Dinas Ketenagakerjaan

1. Ketua : Kepala Dinas Ketenagakerjaan.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan.
3. Kelompok Kerja :
 1. Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Kerja, Transmigrasi dan Pelatihan Produktivitas;

2. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;
3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.

P. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Ketua : Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Kelompok Kerja :
 1. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga;
 2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pergerakan;
 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan;
 5. Penelaah Teknis Kebijakan.

Q. Dinas Perhubungan

1. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan.
3. Kelompok Kerja :
 1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana;
 2. Kepala Bidang Lalu lintas;
 3. Kasubag Program dan Keuangan;
 4. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 5. Operator Perencana.

R. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

1. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
3. Kelompok Kerja :
 1. Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian;
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik, dan Statistik.

S. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian

1. Ketua : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian.
3. Kelompok Kerja :
 1. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 2. Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi Perdagangan;
 3. Kepala Bidang Perdagangan;
 4. Kepala Bidang Perindustrian;

5. Kasubag Program dan Keuangan.

T. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1. Ketua : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
3. Kelompok Kerja :
 1. Kepala Bidang Pengolahan Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
 2. Kepala Bidang Kearsipan;
 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 4. Penata Layanan Operasional;
 5. Staf Perencanaan.

U. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan

1. Ketua : Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan.
3. Kelompok Kerja :
 1. Kepala Bidang Perikanan Budidaya;
 2. Kepala Bidang Perikanan Tangkap;
 3. Kepala Bidang Ketahanan Pangan;
 4. Program dan Keuangan;
 5. Penelaah Teknis Kebijakan.

V. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

1. Ketua : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
3. Kelompok Kerja :
 1. Kepala Bidang Kebudayaan;
 2. Kepala Bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata;
 3. Kepala Bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 4. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Produk Wisata dan Penyelenggaraan Event Pariwisata;
 5. Perencana Ahli Muda.

W. Dinas Pertanian

1. Ketua : Kepala Dinas Pertanian.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pertanian.
3. Kelompok Kerja :
 1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana;
 2. Kepala Bidang Pengendalian Penanggulangan Bencana dan Perijinan Usaha Pertanian;
 3. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 4. Kepala Bidang Penyuluhan;
 5. Fungsional Perencana Ahli Muda.

X. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- 2. Sekretaris : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 3. Kelompok Kerja :
 - 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - 3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi;
 - 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 5. Operator Perencana.

Y. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1. Ketua : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 3. Kelompok Kerja :
 - 1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - 2. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat;
 - 4. Kepala Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintah Desa;
 - 5. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.

Z. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1. Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 3. Kelompok Kerja :
 - 1. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya;
 - 2. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda;
 - 3. Penata Perizinan Ahli Muda;
 - 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 5. Penelaah Teknis Kebijakan.

V. Kecamatan

A. Kecamatan Padaherang

- 1. Ketua : Camat Padaherang.
- 2. Sekretaris : Sekretaris Camat Padaherang.
- 3. Kelompok Kerja :
 - 1. Kasi Pemtrantibum;
 - 2. Kasi PMD;
 - 3. Kasi Ekbang;
 - 4. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - 5. Kasubag Keuangan;
 - 6. Staf/Operator Perencanaan.

B. Kecamatan Mangunjaya

1. Ketua : Camat Mangunjaya.
2. Sekretaris : Sekretaris Camat Mangunjaya.
3. Kelompok Kerja :
 1. Kasi Pemtrantibum;
 2. Kasi PMD;
 3. Kasi Ekbang;
 4. Kasubag Keuangan;
 5. Staf/Operator Perencanaan.

C. Kecamatan Kalipucang

1. Ketua : Camat Kalipucang.
2. Sekretaris : Sekretaris Camat Kalipucang.
3. Kelompok Kerja :
 1. Kasi Pemtrantibum;
 2. Kasi PMD;
 3. Kasi Ekbang;
 4. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 5. Kasubag Keuangan;
 6. Staf/Operator Perencanaan.

D. Kecamatan Pangandaran

1. Ketua : Camat Pangandaran
2. Sekretaris : Sekretaris Camat Pangandaran
3. Kelompok Kerja :
 1. Kasi Pemtrantibum;
 2. Kasi PMD;
 3. Kasi Ekbang;
 4. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 5. Kasubag Keuangan;
 6. Operator Perencanaan.

E. Kecamatan Sidamulih

1. Ketua : Camat Sidamulih.
2. Sekretaris : Sekretaris Camat Sidamulih.
3. Kelompok Kerja :
 1. Kasi Pemtrantibum;
 2. Kasi PMD;
 3. Kasi Ekbang;
 4. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 5. Kasubag Keuangan;
 6. Operator Perencanaan.

F. Kecamatan Parigi

1. Ketua : Camat Parigi.
2. Sekretaris : Sekretaris Camat Parigi.
3. Kelompok Kerja :
 1. Kasi Pemtrantibum;
 2. Kasi PMD;
 3. Kasi Ekbang;
 4. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 5. Kasubag Keuangan;
 6. Operator Perencanaan.

G. Kecamatan Cijulang

1. Ketua : Camat Cijulang.
2. Sekretaris : Sekretaris Camat Cijulang.
3. Kelompok Kerja :
 1. Kasi PMD;
 2. Kasi Tapem;
 3. Kasi Ekbang;

4. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
5. Kasubag Keuangan.

H. Kecamatan Cimerak

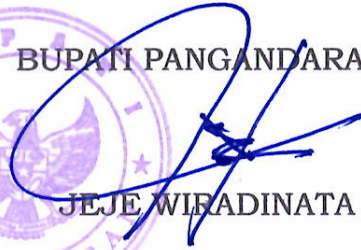
1. Ketua : Camat Cimerak.
2. Sekretaris : Sekretaris Camat Cimerak.
3. Kelompok Kerja :
 1. Kasi PMD;
 2. Kasi Ekbang;
 3. Operator Perencana.

I. Kecamatan Cigugur

1. Ketua : Camat Cigugur.
2. Sekretaris : Sekretaris Camat Cigugur.
3. Kelompok Kerja :
 1. Kasi Tapem dan Trantibum;
 2. Kasi PMD;
 3. Kasi Ekbang;
 4. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 5. Kasubag Keuangan;
 6. Operator Perencanaan.

J. Kecamatan Langkaplancar

1. Ketua : Camat Langkaplancar.
2. Sekretaris : Sekretaris Camat Langkaplancar.
3. Kelompok Kerja :
 1. Kasi Tapem dan Trantibum;
 2. Kasi PMD;
 3. Kasi Ekbang;
 4. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 5. Kasubag Keuangan;
 6. Operator Perencanaan.

BUPATI PANGANDARAN,

JEJE WIRADINATA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : PR.04.02/ Kpts. 294 -Huk/2024
TANGGAL : 28 November 2024

RINCIAN TUGAS
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Pengarah:
Memberikan arahan kepada Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar penyusunan berjalan secara partisipatif, transparan, efisien dan efektif dengan mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- II. Penanggung jawab:
Memberikan pembinaan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar berjalan secara partisipatif, transparan, efisien dan efektif dengan mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- III. Koordinator:
 1. Memberikan arahan teknis kepada Tim Penyusun agar Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berjalan secara partisipatif, transparan, efisien dan efektif dengan mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Menetapkan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 3. Mengatur dan menetapkan pembagian tugas Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 5. Mengoordinasikan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 7. Menetapkan materi khususnya substansi yang berkaitan dengan arah pembangunan Daerah Tahun 2026 dan Tahun 2027; dan
 8. Melaporkan perkembangan dan akhir kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Pengarah dan Penanggung Jawab.
- IV. Perangkat Daerah dan Kecamatan
 1. Ketua:
 - a. menetapkan program kerja penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. mengatur dan menetapkan pembagian Tugas Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. memimpin pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - e. mengoordinasikan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - f. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

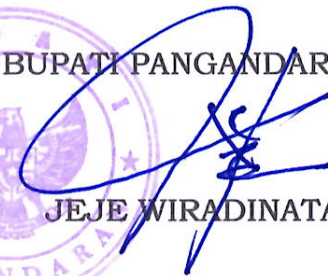
- g. menetapkan materi khususnya substansi yang berkaitan dengan arah pembangunan Daerah Tahun 2026 dan Tahun 2027; dan
- h. melaporkan perkembangan dan akhir kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Koordinator dan Penanggung Jawab.

2. Sekretaris:

- a. menyusun program dan jadwal kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. menyusun pembagian tugas Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. melaksanakan tata kelola administrasi kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. memfasilitasi rapat koordinasi pada persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. menyiapkan bahan yang diperlukan untuk dibahas dan diputuskan di dalam rapat tim; dan
- f. mengoordinasikan kelompok kerja dalam menyusun laporan perkembangan dan akhir kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

3. Kelompok Kerja:

- a. melakukan inventarisasi, verifikasi, kompilasi, pengolahan dan penyajian data dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. melakukan pengkajian dan menganalisis saran usulan secara memadai, proporsional dan sistematis untuk dipertimbangkan/dirumuskan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. melakukan penyempurnaan materi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil rapat tim;
- d. menyiapkan bahan-bahan, sarana dan prasarana kegiatan penyusunan dan pembahasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. menyiapkan fasilitas dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan penyusunan dan pembahasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah supaya berjalan secara lancar; dan
- f. menyusun laporan hasil kegiatan.

BUPATI PANGANDARAN,

JEJE WIRADINATA



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Raya Parigi, No. 180 RT 03/RW 04, Dsn. Kemplung, Desa Karangbenda, Kec. Parigi, Kab. Pangandaran - 46393

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 050/Kpts.011.a/DINSOSPMD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) DINSOSPMD
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2026

KEPALA DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun dokumen Rencana Kerja DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
26. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
37. Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045;
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 52 Tahun 2023 tentang

- Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
 47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 24);
 48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 26);
 49. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 050/Kpts. 006.a/DINSOSPMD/2025 Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinsospmd Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2026.
- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) sebagaimana Diktum KESATU *sebagaimana* tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) DINSOSPMD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- KEEMPAT : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan KEPALA DINSOSPMD ini dibebankan kepada DPA DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh pejabat yang berwenang.

KETUJUH : Keputusan Kepala DINSOSPMD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 17 Juni 2025

KEPALA DINSOSPMD
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. TRISNO

NIP. 19740317 199311 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINSOSPMD KAB.
PANGANDARAN

NOMOR : 050/Kpts.011.a/DINSOSPMD/2025
TANGGAL : 17 Juni 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2026

- I. Penanggungjawab : Kepala DINSOSPMD
- II. Ketua : Sekretaris
- III. Sekretaris : Kasubag Program dan Keuangan
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial;
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
4. Kepala Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintah Desa;
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
6. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda;
7. Pekerja Sosial Ahli Muda;
8. Analis Rehabilitasi Masalah Sosial;
9. Analis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial;
10. Analis Rehabilitasi Masalah Sosial;
11. Analis Bencana;
12. Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan;
13. Bendahara Pengeluaran;
14. Operator Perencanaan;
15. Operator Keuangan;
16. Operator Barang;

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 17 Juni 2025

KEPALA DINSOSPMD
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. TRISNO

NIP. 19740317 199311 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINSOSPMD KAB.
PANGANDARAN

NOMOR : 050/Kpts.011.a/DINSOSPMD/2025
TANGGAL : 17 Juni 2025

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2026

- a. **Penanggungjawab**, mempunyai tugas :
- 1) Mengkoordinasikan secara umum mengenai proses penyusunan dan penetapan Perubahan Renja;
 - 2) Memberi arahan dan masukan dalam proses penyusunan dan penetapan;
 - 3) Mempertanggungjawabkan secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan berikut hasilnya.
- b. **Ketua**, mempunyai tugas :
- 1) Mempelajari arah kebijakan Kabupaten;
 - 2) Mengkoordinasikan hal-hal teknis pelaksanaan kegiatan;
 - 3) Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi;
 - 4) Melaporkan hasil kegiatan kepada penanggungjawab.
- c. **Sekretaris**, mempunyai tugas :
- 1) Menyelenggarakan administrasi kegiatan Perubahan Rencana Kerja (Renja) lingkup internal DINSOSPMD meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
 - 2) Membantu Ketua dalam koordinasi penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja);
 - 3) Membantu Ketua dalam membuat laporan Perubahan Rencana Kerja (Renja).
- d. **Anggota**, mempunyai tugas :
- 1) Membantu Ketua dalam mempelajari arah kebijakan Kabupaten;
 - 2) Membantu Ketua dalam mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi;
 - 3) Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal teknis pelaksanaan kegiatan;
 - 4) Menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 17 Juni 2025

KEPALA DINSOSPMD
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. TRISNO

NIP. 19740317 199311 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) yang telah ditetapkan untuk Tahun anggaran 2026. Rencana Kerja ini didalamnya merupakan penentuan indikator kinerja yang dapat terukur secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian dan keberhasilan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini kami telah berupaya semaksimal mungkin walaupun dalam proses penyusunannya kami mengalami hambatan, karena keterbatasan yang ada, harapan kami semoga Rencana Kerja (RENJA) ini dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang berkepentingan sehingga dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya pencapaian hasil yang terbaik bagi setiap program kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran ini kami sadari masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat kekurangan didalamnya, untuk itu kami mohon masukan dan saran yang dapat dijadikan bahan perbaikan oleh kami untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang akan datang agar lebih baik.

Akhirnya, besar harapan kami semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna, serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 23 Juli 2025
Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pangandaran



Drs. TRISNO
NIP. 19740317 199311 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINSOS PMD	
TAHUN LALU	9
2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	9
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	24
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH.....	27
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	27
2.5 PENELAAHAN TERHADAP USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
MASYARAKAT	47
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINSOSPMD	51
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI .	51
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINSOS PMD	56
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	58
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINSOSPMD	79
BAB V PENUTUP	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja DINSOSPMD Tahun 2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, secara substansi mengamankan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) DINSOSPMD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja DINSOSPMD Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
26. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

- Daerah)Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 36. Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 tetang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045;
 42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
 43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
 46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 24);
 47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 26);
 48. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 050/Kpts. 006.a/DINSOSPMD/2025 Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinsospmd Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029;
 49. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 050/Kpts.015/DINSOSPMD/2025 Tentang Pengesahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja DINSOSPMD Tahun 2026 Kabupaten Pangandaran disusun dengan maksud:

- a. Mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan Kabupaten Pangandaran Khususnya di Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Merupakan dokumen perencanaan dan prioritas program satu tahun.

Tujuan disusunnya Renja DINSOSPMD Tahun 2026 adalah :

- a. Memperoleh dokumen rencana kerja untuk satu tahun
- b. Memberikan arah dan acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan DINSOSPMD.
- c. Memberikan pedoman operasional sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja DINSOSPMD Tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan secara ringkas pengertian Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L dan Renja Provinsi dan tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menjelaskan tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan MDGs (Millenium

Development Goals), serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Menjelaskan hasil penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada setiap Perangkat Daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan hasil telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan program dan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun rencana yang dilengkapi dengan lokasi dan indikasi pendanaan yang dibutuhkan berdasarkan sumber dana APBD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan kaidah pelaksanaan sesuai dengan Renja Perangkat Daerah, penegasan komitmen Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD, serta penegasan Renja Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan RKA Perangkat Daerah pada tahun rencana.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINSOS PMD TAHUN LALU

 Seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah berkewajiban mengevaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu atau sebelumnya, hal ini bertujuan tidak lain untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi

 Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Perangkat Daerah terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Adapun tiap urusan dijabarkan kembali dengan program dan kegiatan yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya

2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

 Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran pada tahun 2025 tidak mengalami hambatan yang berarti hal tersebut dapat terlihat pada pencapaian atas realisasi kinerja dan taget rencana yang sebagian besar terpenuhi, bahkan mayoritas realisasi kinerja melampaui target. Namun demikian masih terdapat beberapa target sasaran yang tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan.

 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 ada beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak mencapai target dikarenakan kurang dukungan data yang valid. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di form berikut :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DINSOSPMD dan Pencapaian Renstra DINSOSPMD s/d Tahun 2025
Kabupaten Pangandaran

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Dinsospmd Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsospmd s/d tahun berjalan				
													Target Renja Dinsospmd tahun 2024		Realisasi Renja Dinsospmd Tahun 2024			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1							2	3	4		5		6		7		8=7/6	9		10=5+7+9		11=10/4
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			102,077,324,904.38		22,455,561,355.00		12,646,334,388.00		5,635,876,119.00	44.57%		9,382,462,085.00		30,114,512,445.00	29.50%
1	0	0	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	95	33,924,302,262.49	92	7,628,353,999.00	93	5,916,176,729.00	93.00	3,114,376,309.00	52.64%	94	3,692,462,085.00	46.00	12,213,007,279.00	36.00%
								2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100	-	100	-	100		100.00			100		50.00	-	
								3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	95	-	92	-	93		93.00			94		46.00	-	
								4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100	-	100	-	100		100.00			100		50.00	-	
1	0	0	1	2	0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	100	483,192,548.00	100	92,298,000.00	100	86,490,800.00	100.00	13,477,000.00	15.58%	-	-	100.00	115,975,000.00	24.00%
								2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	100	-	100	-	100		100.00			-	-	100.00	-	
								3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100	-	100	-	100		100.00			-	-	100.00	-	

Rencana Kerja

2026

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Dinsospmd Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsospmd s/d tahun berjalan				
												Target Renja Dinsospmd tahun 2024		Realisasi Renja Dinsospmd Tahun 2024			Tingkat Realisa si (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4		5		6		7		8=7/6	9		10=5+7+9	11=10/4	
1	0	0	2	0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	483,192,548.00	6	92,298,000.00	2	86,490,800.00	2.00	13,477,000.00	15.58%	-	-	10.00	115,975,000.00	24.00%
1	0	0	2	0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100	19,003,732,388.83	100	5,956,637,452.00	100	3,203,388,053.00	100.00	2,495,520,163.00	77.90%	100	2,645,450,578.00	100.00	9,419,002,775.00	49.56%
1	0	0	2	0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	111	18,590,921,840.83	57	5,832,051,452.00	19	3,141,097,253.00	19.00	2,471,703,163.00	78.69%	16	2,645,450,578.00	95.00	9,251,999,775.00	49.77%
1	0	0	2	0	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7	412,810,548.00	3	124,586,000.00	1	62,290,800.00	1.00	23,817,000.00	38.24%			5.00	167,003,000.00	40.46%
1	0	0	2	0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	8	377,248,970.00	8	53,698,000.00	8	66,187,000.00	8.00	13,020,000.00	19.67%			8.00	76,918,000.00	20.39%
								278	-	298	-	278		278.00					298.00	-	
1	0	0	2	0	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	7	179,627,500.00	0	-	1	30,250,000.00		-				-	-	0.00%
1	0	0	2	0	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	84	197,621,470.00	12	53,698,000.00	12	35,937,000.00	12.00	13,020,000.00	36.23%			12.00	76,918,000.00	38.92%
1	0	0	2	0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100	202,155,281.20	100	43,900,000.00	100	36,556,520.00	100.00	10,500,000.00	28.72%			100.00	62,800,000.00	31.07%
1	0	0	2	0	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	7	202,155,281.20	3	43,900,000.00	1	36,556,520.00	1.00	10,500,000.00	28.72%			5.00	62,800,000.00	31.07%

Rencana Kerja

2026

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				Target program dan kegiatan (Renja Dinsospmd Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsospmd s/d tahun berjalan			
												Target Renja Dinsospmd tahun 2024		Realisasi Renja Dinsospmd Tahun 2024				Tingkat Realisa si (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4		5		6		7		8=7/6	9	10=5+7+9		11=10/4	
1	0	0	2	0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	96	2,695,332,572.70	94	371,645,075.00	96	450,612,470.00	96.00	141,178,146.00	31.33%	96	150,852,703.00	94.00	588,415,156.00	21.83%
1	0	0	2	0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	77,084,905.00	3	4,414,217.00	1	12,100,000.00	1.00	1,900,000.00	15.70%	1	2,597,834.00	5.00	8,828,717.00	11.45%
1	0	0	2	0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	7	896,184,262.00	3	191,634,991.00	1	171,360,200.00	1.00	44,760,950.00	26.12%	1	45,000,457.00	5.00	279,723,941.00	31.21%
1	0	0	2	0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	7	99,869,212.50	2	4,984,449.00	1	15,373,050.00	1.00	2,262,500.00	14.72%	1	2,277,016.00	4.00	9,344,949.00	9.36%
1	0	0	2	0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	125,826,982.50	3	6,711,628.00	1	19,148,250.00	1.00	1,358,750.00	7.10%	1	2,031,340.00	5.00	9,120,378.00	7.25%
1	0	0	2	0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7	247,764,372.00	3	65,329,000.00	1	45,641,200.00	1.00	23,640,000.00	51.80%	1	25,174,800.00	5.00	97,719,000.00	39.44%
1	0	0	2	0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	690	1,248,602,838.70	107	98,570,790.00	90	186,989,770.00	90.00	67,255,946.00	35.97%	100	73,771,256.00	223.00	183,678,171.00	14.71%
1	0	0	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100	7,501,625,113.76	100	369,200,000.00	100	1,406,135,086.00	100.00	230,000,000.00	16.36%	100	230,000,000.00	100.00	829,200,000.00	11.05%
1	0	0	2	0	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	11	827,400,000.00	0	-	1	40,000,000.00						-	-	0.00%

Rencana Kerja

2026

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Dinsospmd Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsospmd s/d tahun berjalan				
												Target Renja Dinsospmd tahun 2024		Realisasi Renja Dinsospmd Tahun 2024			Tingkat Realisa si (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4		5		6		7		8=7/6	9		10=5+7+9		11=10/4
1	0	0	2	0	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	34	2,717,353,613.76	0	-	6	503,485,086.00		0.00%			-	-	0.00%	
1	0	0	2	0	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	3,746,871,500.00	1.00	513,200,000.00	1	862,650,000.00	1.00	230,000,000.00	26.66%	1	230,000,000.00	1.00	973,200,000.00	25.97%
1	0	0	2	0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	2	210,000,000.00	0	-							-	-	0.00%	
1	0	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100	1,807,526,028.00	100	368,276,267.00	100	335,266,800.00	100.00	125,374,999.00	37.40%	100	562,806,400.00	100.00	588,771,042.00	32.57%
1	0	0	2	0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84	68,051,000.00	27	2,500,000.00	12	12,100,000.00	6.00	1,776,000.00	14.68%	12	2,000,000.00	36.00	5,272,000.00	7.75%
1	0	0	2	0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84	720,165,920.00	12	135,476,267.00	12	133,100,000.00	12.00	61,098,999.00	45.90%	12	75,406,400.00	12.00	237,899,042.00	33.03%
1	0	0	2	0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	1,019,309,108.00	27	230,300,000.00	12	190,066,800.00	12.00	62,500,000.00	32.88%	12	485,400,000.00	45.00	345,600,000.00	33.91%
1	0	0	2	0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	90	1,853,489,360.00	84	228,699,205.00	84	331,540,000.00	84.00	85,306,001.00	25.73%	84	103,352,404.00	84.00	387,925,306.00	20.93%
1	0	0	2	0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	556,924,376.00	2	113,338,793.00	2	101,640,000.00	2.00	46,430,501.00	45.68%	2	49,058,398.00	2.00	196,267,794.00	35.24%

Rencana Kerja

2026

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Dinsospmd Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsospmd s/d tahun berjalan				
													Target Renja Dinsospmd tahun 2024		Realisasi Renja Dinsospmd Tahun 2024			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1							2	3	4		5		6			7		8=7/6	9		10=5+7+9	11=10/4
							Jabatan															
1	06	01	2	09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	961,280,984.00	11	99,547,512.00	11	181,500,000.00	11.00	37,375,500.00	20.59%	11	48,289,936.00	11.00	168,458,612.00	17.52%
1	06	01	2	09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	7	132,102,000.00	7	8,276,400.00	7	24,200,000.00	1.00	1,500,000.00	6.20%	7	3,000,000.00	7.00	12,776,400.00	9.67%
1	06	01	2	09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	203,182,000.00	1	7,536,500.00	1	24,200,000.00	-	-	0.00%	1	3,004,070.00	-	10,422,500.00	5.13%
1	06	02					PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	80	4,618,045,791.00	60	193,690,145.00	70	400,000,000.00	52.50	54,000,000.00	13.50%	75	66,000,000.00	75.00	275,190,145.00	5.96%
								Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100	-	80	-	90		67.50			95	95.00	-		
1	06	02	2	03			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kemampuan SDM PSKS	13	4,618,045,791.00	13	193,690,145.00	13	400,000,000.00	13.00	54,000,000.00	13.50%	13	66,000,000.00	13.00	275,190,145.00	5.96%

Rencana Kerja | 2026

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Dinsospmd Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsospmd s/d tahun berjalan					
													Target Renja Dinsospmd tahun 2024		Realisasi Renja Dinsospmd Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1							2	3	4		5		6		7	8=7/6	9	10=5+7+9		11=10/4		
								Jumlah partisipasi lembaga dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	1	-	1	-	1		1.00		1		1.00	-		
1	0	0	2	0	02		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13	1,316,791,039.00	13	177,990,145.00	13	100,000,000.00	13.00	54,000,000.00	54.00%	13	66,000,000.00	13.00	259,490,145.00	19.71%
1	0	0	2	0	04		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1	3,301,254,752.00	1	15,700,000.00	1	300,000,000.00	-	0.00%			1.00	15,700,000.00	0.48%	
1	0	0	4				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	48.20	42,477,620,999.89	24	6,823,487,331.00	8	3,859,450,059.00	8.00	207,522,000.00	5.38%	8	4,370,000,000.00	36.00	7,153,609,831.00	16.84%
1	0	0	4	2	0		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar yang dibina	6834	5,793,918,499.39	2343	1,592,636,331.00	1,200	590,309,069.00	221.00	95,792,000.00	16.23%	1,200	3,350,000,000.00	2,694.00	1,727,306,331.00	29.81%
1	0	0	4	2	0	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	5954	2,072,071,000.00	2114	605,261,464.00	1,000	254,100,000.00		12,600,000.00	4.96%	1,000	180,000,000.00	2,114.00	617,861,464.00	29.82%

Rencana Kerja | 2026

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024					Target program dan kegiatan (Renja Dinsospmd Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsospmd s/d tahun berjalan					
											Target Renja Dinsospmd tahun 2024		Realisasi Renja Dinsospmd Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1							2	3	4		5		6		7		8=7/6	9		10=5+7+9		11=10/4
								Kabupaten/Kota														
1	06	04	2	01	04		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	205	333,433,339.39	49	56,538,617.00	20	37,273,069.00	41.00	15,177,000.00	40.72%	20	3,040,000,000.00	130.00	84,778,617.00	25.43%
1	06	04	2	01	06		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1233	3,388,414,160.00	290	930,836,250.00	180	298,936,000.00	180.00	68,015,000.00	22.75%	180	130,000,000.00	560.00	1,024,666,250.00	30.24%
1	06	04	2	02			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS yang dibina	1100	36,683,702,500.50	285	5,230,851,000.00	150	3,269,140,990.00	4.00	111,730,000.00	3.42%	150	1,020,000,000.00	389.00	5,426,303,500.00	14.79%
1	06	04	2	02	02		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	1155	368,710,802.50	285	58,485,000.00	200	50,547,750.00	4.00	20,200,000.00	39.96%			389.00	94,085,000.00	25.52%

Rencana Kerja

2026

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Dinsospmd Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsospmd s/d tahun berjalan					
												Target Renja Dinsospmd tahun 2024		Realisasi Renja Dinsospmd Tahun 2024		Tingkat Realisa si (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1						2	3	4		5		6			7		8=7/6	9	10=5+7+9		11=10/4
1	0	0	2	0	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	6	36,314,991,698.00	3	5,172,366,000.00	1	3,218,593,240.00	1.00	91,530,000.00	2.84%	1	1,020,000,000.00	5.00	5,332,218,500.00	14.68%
1	0	0				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	60	11,563,279,065.00	30	6,924,617,665.00	10	1,047,707,600.00	10.00	1,881,216,810.00	179.56 %	10	648,000,000.00	45.00	9,021,634,475.00	78.02%
1	0	0	2	0		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang berhak mendapatkan Bantuan	7	11,563,279,065.00	3	6,924,617,665.00	1	1,047,707,600.00	1.00	1,881,216,810.00	179.56 %	1	648,000,000.00	5.00	9,021,634,475.00	78.02%
1	0	0	2	0	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	22,711.00	4,899,226,928.00	17064	946,185,689.00	18,770	432,000,000.00	19,037.00	351,500,000.00	81.37%	17,064	408,000,000.00	55,138.00	1,456,785,689.00	29.74%
1	0	0	2	0	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	139,955.00	5,664,052,137.00	105151	550,808,340.00	115,666	415,707,600.00	242,720	153,032,410.00	36.81%	105,151	40,000,000.00	590,591.00	720,640,750.00	12.72%
1	0	0	2	0	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1500	1,000,000,000.00	19935	5,427,623,636.00	300	200,000,000.00	1,050	1,376,684,400.00	688.34 %	300	200,000,000.00	21,312.00	6,844,208,036.00	684.42%

Rencana Kerja

2026

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Dinsospmd Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsospmd s/d tahun berjalan					
												Target Renja Dinsospmd tahun 2024		Realisasi Renja Dinsospmd Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1						2	3	4		5		6		7	8=7/6	9		10=5+7+9		11=10/4	
1	0	0				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup	100	8,538,547,418.00	100	721,281,564.00	100	1,302,000,000.00	100.00	332,751,000.00	25.56%	100	566,000,000.00	100.00	1,237,482,564.00	14.49%
1	0	0	2	0		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang tertangani	2500	1,658,500,000.00	0	-	500	350,000,000.00				500	200,000,000.00	-	-	0.00%
1	0	0	2	0	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2500	829,250,000.00	0	-	500	175,000,000.00				500	100,000,000.00	-	-	0.00%
1	0	0	2	0	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2500	829,250,000.00	0	-	500	175,000,000.00				500	100,000,000.00	-	-	0.00%
1	0	0	2	0		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk serta dibina	14	6,880,047,418.00	8	886,399,460.00	2	952,000,000.00	2.00	332,751,000.00	34.95%	2	366,000,000.00	8.00	1,402,600,460.00	20.39%
1	0	0	2	0	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	471	6,880,047,418.00	177	886,399,460.00	71	952,000,000.00	61.00	332,751,000.00	34.95%	81	366,000,000.00	299.00	1,402,600,460.00	20.39%

Rencana Kerja | 2026

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024					Target program dan kegiatan (Renja Dinsospmd Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsospmd s/d tahun berjalan		
												Target Renja Dinsospmd tahun 2024		Realisasi Renja Dinsospmd Tahun 2024		Tingkat Realisa si (%)					
1						2	3	4		5		6		7		8=7/6	9		10=5+7+9		11=10/4
							Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota														
1	0	0				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola	100	955,529,368.00	100	164,130,651.00	100	121,000,000.00	100.00	46,010,000.00	38.02%	100	40,000,000.00	100.00	213,588,151.00	22.35%
1	0	0	2	0		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1	955,529,368.00	1	164,130,651.00	1	121,000,000.00	1.00	46,010,000.00	38.02%	1	40,000,000.00	1.00	213,588,151.00	22.35%
1	0	0	2	0		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	31	955,529,368.00	31	164,130,651.00	31	121,000,000.00	31.00	46,010,000.00	38.02%	31	40,000,000.00	31.00	213,588,151.00	22.35%
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			219,263,826,495.80	0	11,680,342,800.00		27,739,589,594.00		1,390,936,400.00	5.01%		3,691,000,000.00	-	13,372,641,000.00	6.10%
2	1	0				Program Penataan Desa	Presentase penataan desa	70	1,052,893,000.00	0	-	60	12,280,300,000.00	12.00	19,999,500.00	0.16%			12.00	19,999,500.00	1.90%
2	1	0	2	0		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang di tata	93	1,052,893,000.00	0	-	93	12,280,300,000.00	8.00	19,999,500.00	0.16%			8.00	19,999,500.00	1.90%
2	1	0	2	0	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	93	255,255,000.00	0	-	24	60,500,000.00	8.00	19,999,500.00				8.00	19,999,500.00	7.84%
2	1	0	2	0	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	93	403,153,000.00	0	-	24	36,300,000.00						-	-	0.00%
2	1	0	2	0	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	93	394,485,000.00	0	-	93	12,183,500,000.00						-	-	0.00%

Rencana Kerja | 2026

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				Target program dan kegiatan (Renja Dinsospmd Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsospmd s/d tahun berjalan			
												Target Renja Dinsospmd tahun 2024		Realisasi Renja Dinsospmd Tahun 2024				Tingkat Realisa si (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5		6		7		8=7/6	9	10=5+7+9		11=10/4	
2	1	0				Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	20	94,658,500,000.00	0	-	12	100,000,000.00							0.00%	
2	1	0	2	0		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Fasilitasi Kerjsama Desa	24	94,658,500,000.00	0	-	4	100,000,000.00							0.00%	
2	1	0	2	0	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5	458,500,000.00	0	-	4	100,000,000.00							0.00%	
2	1	0	2	0	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1	94,200,000,000.00	0	-									0.00%	
2	1	0				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	70	57,808,777,920.80	55	1,087,680,965.00	60	3,067,089,594.00	60.00	133,371,400.00	4.35%	65	500,000,000.00	55.00	1,306,064,165.00	2.26%
2	1	0	2	0		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	93	57,808,777,920.80	93	1,087,680,965.00	93	3,067,089,594.00	93.00	133,371,400.00	4.35%	93	500,000,000.00	93.00	1,306,064,165.00	2.26%
2	1	0	2	0	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	7	1,172,323,061.00	1	17,650,000.00	1	300,000,000.00		-		1	55,000,000.00	1.00	17,650,000.00	1.51%
2	1	0	2	0	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	5	1,364,547,395.80	0	-	1	335,814,923.00		-		1	20,000,000.00	1.00	4,030,000.00	0.30%
2	1	0	2	0	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	6	2,450,000,000.00	1	10,500,000.00	1	550,000,000.00	1.00	10,500,000.00			3.00	29,400,000.00	1.20%	
2	1	0	2	0	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	7	1,236,802,440.00	3	251,537,500.00	1	300,000,000.00	1.00	43,937,400.00	14.65%	1	70,000,000.00	5.00	317,512,900.00	25.67%
2	1	0	2	0	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan	3457	3,026,462,892.00	558	61,959,000.00	186	352,500,000.00	-	-	0.00%	186	65,000,000.00	558.00	61,959,000.00	2.05%

Rencana Kerja

2026

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024					Target program dan kegiatan (Renja Dinsospmd Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsospmd s/d tahun berjalan		
													Target Renja Dinsospmd tahun 2024		Realisasi Renja Dinsospmd Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1							2	3	4		5		6		7		8=7/6	9	10=5+7+9		11=10/4	
								Peningkatan Kapasitas														
2	13	04	2	01	06		evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	5	535,510,000.00	0	-	1	121,000,000.00		-			-	-	0.00%	
2	13	04	2	01	07		pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	7	40,233,963,896.00	1	38,975,000.00	1	330,000,000.00	1.00	16,381,000.00		1	30,000,000.00	3.00	89,099,800.00	0.22%
2	13	04	2	01	08		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	93	2,900,000,000.00	25	630,589,465.00				-	#DIV/0!	8	150,000,000.00	25.00	630,589,465.00	21.74%
2	13	04	2	01	10		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100	280,255,000.00	0	-	20	60,500,000.00		-			-	-	0.00%	
2	13	04	2	01	11		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	7	862,317,856.00	3	43,900,000.00	1	50,000,000.00	1.00	38,960,000.00	77.92%	1	25,000,000.00	5.00	91,260,000.00	10.58%
2	13	04	2	01	12		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	5	428,408,000.00	1	10,500,000.00	1	96,800,000.00	1.00	23,593,000.00		1	40,000,000.00	3.00	42,493,000.00	9.92%
2	13	04	2	01	13		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	465	748,300,000.00	0	-	93	200,000,000.00		-	0.00%			-	-	0.00%
2	13	04	2	01	18		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	6	2,569,887,380.00	1	22,070,000.00	1	370,474,671.00		-		1	45,000,000.00	1.00	22,070,000.00	0.86%

Rencana Kerja | 2026

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Dinsospmd Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsospmd s/d tahun berjalan				
												Target Renja Dinsospmd tahun 2024	Realisasi Renja Dinsospmd Tahun 2024				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1						2	3	4		5		6			7		8=7/6	9		10=5+7+9	11=10/4
2	1	0				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Lembaga Kemasyarakat Desa yang aktif	100	65,743,655,575.00	100	11,932,667,085.00	100	12,292,200,000.00	100.00	1,237,565,500.00	10.07%	100	3,191,000,000.00	100.00	13,386,582,585.00	20.36%
	3	5																			
2	1	0	2	0		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	5	65,743,655,575.00	5	11,932,667,085.00	1	12,292,200,000.00	1.00	1,237,565,500.00	10.07%	5	3,191,000,000.00	5.00	13,386,582,585.00	20.36%
	3	5		1																	
2	1	0	2	0	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6	53,411,909,964.00	3	7,779,763,786.00	1	8,550,700,000.00	1.00	307,872,000.00	3.60%	1	366,000,000.00	5.00	8,200,685,786.00	15.35%
	3	5		1																	
2	1	0	2	0	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan	6	581,000,000.00	1	28,048,500.00	1	100,000,000.00	1.00	10,495,000.00		1	15,000,000.00	3.00	38,543,500.00	6.63%
	3	5		1																	

Rencana Kerja | 2026

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Dinsospmd Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsospmd s/d tahun berjalan				
													Target Renja Dinsospmd tahun 2024		Realisasi Renja Dinsospmd Tahun 2024			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1							2	3	4		5		6		7		8=7/6	9		10=5+7+9		11=10/4
							Pendapatan Asli Desa	Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
2	13	05	2	01	06		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7	914,765,000.00	0	-	1	181,500,000.00	-		1	35,000,000.00	-	-	0.00%	
2	13	05	2	01	07		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18	4,180,880,611.00	9	2,037,054,799.00	3	2,250,000,000.00	2.00	398,198,500.00	17.70%	3	2,275,000,000.00	12.00	2,471,753,299.00	59.12%
2	13	05	2	01	09		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6	6,655,100,000.00	3	2,087,800,000.00	1	1,210,000,000.00	1.00	521,000,000.00	43.06%	1	500,000,000.00	5.00	2,675,600,000.00	40.20%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolok ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran sebagai penyelenggara pelayanan dalam urusan sosial telah memiliki tolok ukur yang jelas yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan program / kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun seluruh Target Capaian dan hasil pengukuran indikator kinerja dapat dilihat di format sebagai berikut:

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan DINSOSPMD
Kabupaten Pangandaran

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial	100%	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;	100%	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial	100%	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	
4	. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial;	100%	. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial;	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	100%	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran sebagai berikut:

1. SDM Aparatur masih sangat terbatas baik kuantitas maupun kualitas.
2. Sarana dan prasanara perkantoran belum memadai.
3. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum optimal.
4. Penyediaan sarana dan prasarana sosial belum memadai.
5. Sarana dan Prasarana untuk Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat belum memadai.
6. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.
7. Penanganan ODGJ dan Orang Terlantar Belum Maksimal.
8. Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa masih belum optimal.
9. SDM Pengelolaan Sistem Keuangan Desa perlu ditingkatkan.
10. Kapasitas masyarakat, permodalan, dukungan sarana dan prasarana ekonomi, serta pendampingan kepada rumah tangga kurang mampu dan miskin belum optimal.
11. Peningkatan Kapasitas Pendampingan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa melalui Bimbingan Teknis.
12. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah sangat tinggi.
13. Pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDes) belum optimal.
14. Koordinasi dan konsolidasi inter dan antar pemangku kepentingan perlu ditingkatkan sinkronisasi.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan arahan dari Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk DINSOS PMD berdasarkan RKPD.

Adapun Lampiran RKPD dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

RKPD Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	85%	1,058,563,556.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	85%	3,707,689,000.00	
2			2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%				2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%		
3			3. Cakupan layanan kepegawaian	100%				3. Cakupan layanan kepegawaian	100%		
4			4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%				4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%		
5						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	100%	10,000,000.00	
6								2. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%		

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5,000,000.00	
8						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	5,000,000.00	
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	2,729,467,312.00	
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/Bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/Bulan	2,729,467,312.00	
11						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%	45,000,000.00	
12						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	20,000,000.00	
13						Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab. Pangandaran	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 Orang	5,000,000.00	
14						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pangandaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	2 Orang	15,000,000.00	

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Pendidikan dan Pelatihan			
15						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	5,000,000.00	
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	148,563,264.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	170,500,000.00	
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,768,005.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	46,790,114.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	47,000,000.00	
19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2,313,205.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2,500,000.00	
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1,582,900.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2,000,000.00	

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	25,079,040.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	26,000,000.00	
22						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15,000,000.00	
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	70,030,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75,000,000.00	
24	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%	230,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%	230,000,000.00	
25	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	230,000,000.00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	230,000,000.00	
26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	578,688,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	402,721,688.00	
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000.00	
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 Laporan	87,400,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 Laporan	60,000,000.00	

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			dan Listrik yang Disediakan					dan Listrik yang Disediakan			
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	489,288,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	340,721,688.00	
30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%	101,312,292.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%	120,000,000.00	
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	49,420,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	50,000,000.00	
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	45,875,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	60,000,000.00	
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	3,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	5,000,000.00	

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3,017,292.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000.00	
35	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Presentase meningkatnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	92%	72,000,000.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Presentase meningkatnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	92%	20,000,000.00	
36	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peningkatan Kemampuan PSKS	13 orang	72,000,000.00	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peningkatan Kemampuan PSKS	104 orang	20,000,000.00	
37			Jumlah partisipasi lembaga dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	1 Lembaga				Jumlah partisipasi lembaga dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	28 Lembaga		

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
38	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	72,000,000.00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Lembaga	10,000,000.00	
39						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	104 orang	10,000,000.00	
40	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	91%	1,254,161,500.00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	91%	55,000,000.00	
41	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar yang dibina	1200 Orang	234,190,500.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar yang dibina	1791 Orang	40,000,000.00	

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
42	Penyediaan Permakanan	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	150,000,000.00						
43	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	44,279,000.00	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	20,000,000.00	
44	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Pangandaran	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	39,911,500.00	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Pangandaran	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1771 Orang	20,000,000.00	

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
45	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS yang dibina	150 KK	1,019,971,000.00	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS yang dibina	50 KK	15,000,000.00	
46						Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	5,000,000.00	
47						Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Pangandaran	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	10,000,000.00	

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
48	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,019,971,000.00						
49	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	15%	772,575,000.00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	15%	40,000,000.00	
50	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang berhak mendapatkan Bantuan	1 dokumen	772,575,000.00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang berhak mendapatkan Bantuan	1 dokumen	40,000,000.00	
51	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	22.711 Orang	76,975,000.00	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	239.942 Orang	10,000,000.00	
52						Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan	10 Orang	10,000,000.00	

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Kabupaten/Kota			
53	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pangandaran	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	645,600,000.00	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pangandaran	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	327 Orang	10,000,000.00	
54	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	139.955 Usulan	50,000,000.00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	11.000 Usulan	10,000,000.00	
55	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup	100%	550,000,000.00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup	100%	5,940,000.00	

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
56	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang tertangani	500 KK	150,000,000.00						
57	Penyediaan Makanan	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	75,000,000.00						
58	Penyediaan Sandang	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	75,000,000.00						
59	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana		Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk serta dibina	2 desa	400,000,000.00	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana		Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk serta dibina	2 desa	5,940,000.00	

Rencana Kerja | 2026

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
60	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	61 Orang	400,000,000.00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	61 Orang	5,940,000.00	
61	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola	100%	37,706,880.00	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola	100%	15,000,000.00	
62	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1 taman makam	37,706,880.00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1 taman makam	15,000,000.00	
63	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota	31 Makam	37,706,880.00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota	31 Makam	15,000,000.00	
64	PROGRAM PENATAAN DESA		Presentase penataan desa	2%	30,000,000.00	PROGRAM PENATAAN DESA		Presentase penataan desa	2%	10,000,000.00	
65	Penyelenggaraan Penataan Desa		Jumlah Desa yang di tata	93 desa	30,000,000.00	Penyelenggaraan Penataan Desa		Jumlah Desa yang di tata	2 desa	10,000,000.00	

Rencana Kerja | 2026

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
66	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab. Pangandaran	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	25 desa	10,000,000.00						
67	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Pangandaran	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	25 desa	10,000,000.00						
68	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Pangandaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	93 unit	10,000,000.00	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Pangandaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	2 unit	10,000,000.00	
69	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	4%	10,000,000.00	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	4%	5,000,000.00	
70	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		Jumlah Fasilitasi Kerjasama Desa	4 desa	10,000,000.00	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		Jumlah Fasilitasi Kerjasama Desa	4 desa	5,000,000.00	
71	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	10,000,000.00	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	5,000,000.00	
72	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	65%	244,102,800.00	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	65%	50,000,000.00	
73	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	93 desa	244,102,800.00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	93 desa	50,000,000.00	

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
74	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 dokumen	10,000,000.00						
75	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 dokumen	10,000,000.00	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 dokumen	5,000,000.00	
76	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 dokumen	10,000,000.00						
77	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 dokumen	13,638,000.00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 dokumen	5,000,000.00	
78	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Pangandaran	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	186 orang	62,636,000.00	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Pangandaran	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	186 orang	15,000,000.00	
79	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 dokumen	10,000,000.00						

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
80	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 dokumen	47,828,800.00	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 dokumen	20,000,000.00	
81	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 dokumen	10,000,000.00						
82	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 dokumen	10,000,000.00	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 dokumen	5,000,000.00	
83	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	93 Orang	10,000,000.00						
84	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 dokumen	50,000,000.00						
85	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	100%	880,957,108.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	100%	1,199,000,000.00	

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
86	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	5 lembaga	880,957,108.00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	5 lembaga	1,199,000,000.00	
87	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	231,000,000.00	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1,139,000,000.00	

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
88	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	10,000,000.00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	10,000,000.00	
89	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	32,447,108.00	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	10,000,000.00	
90	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3 Laporan	107,510,000.00	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3 Laporan	30,000,000.00	
91	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	500,000,000.00	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	10,000,000.00	

2.5 PENELAAHAN TERHADAP USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2026, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Penelaahan / review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam table berikut :

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Pangandaran

No	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembangunan Saluran Tengah Dusun Patrol, Kab. Pangandaran	Jumlah Saluran Tengah yang di bangun	Pembangunan Saluran Tengah Dusun Patrol /P=1.000 m, L=1 m, T=1 / anggaran Rp. 753.105.500	Dapat dianggarkan di APBDES
2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	DUSUN JANGRAGA RT023 RW06 DESA JANGRAGA KECAMATAN MANGUNJAYA, Kab. Pangandaran	Jumlah Kantor Desa yang dibangun	pembangunan kantor desa jangraga P=8mL=5mT=4M, anggaran Rp.125.000.000	Dapat dianggarkan di APBDES
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT AN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	DESA JANGRAGA KECAMATAN MANGUNJAYA , Kab. Pangandaran	Jumlah Kelompok Tani yang dibina	PEMBANGUNAN PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN BAGI KELOMPOK TANI KARYAMUKTI II DESA JANGRAGA KECAMATAN MANGUNJAYA ANGGARAN RP.150.000.000	Seharusnya usulan ditujukan ke OPD Dinas Pertanian

No	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya , Kab. Pangandaran	Jumlah Bimdesa yang dibina	Diperlukan peningkatan Kapasitas BUMDES Kecamatan Mangunjaya dan Kecamatan Padaherang untuk stimulasi dan menjadi mumpuni dengan total anggaran Rp 250.000.000;	Diakomodir dalam renja SKPD tapi sifatnya hanya Pembinaan dan Pemberdayaan terhadap BUMDesa.
5	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Desa Sidomulyo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Rutilahu yang dibangun	rumahnya tidak layak huni sebanyak 20 unit dengan anggaran sebesar Rp. 420.000.000,-.	Dimasukan di dalam renja sebanyak 2 unit
6		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dusun Pondoklombok RT 03 RW 06 Desa Siodmulyo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Kab. Pangandaran	Jumlah Bumdes yang di bina	Bumdes Cempaka Sejahtera belum mengalami Perkembangan Sehingga dibutuhkan Penguatan Modal sebanyak Rp. 100.000.000,-	Diakomodir dalam renja SKPD tapi sifatnya hanya Pembinaan dan Pemberdayaan terhadap BUMDesa.

No	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Desa Legokjawa, Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Rutilahu yang dibangun	Masih banyaknya rumah yang masih tidak layak huni di wilayah Desa Legokjawa	Dimasukan di dalam renja sebanyak 2 unit
8	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Sekretariat Desa Ciliang, Kab. Pangandaran	Jumlah Bumdes yang di bina	Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya SDM yang dimiliki para pengurus BUMDES, salasatunya ialah dalam hal pengembangan usaha dan penata usahaan keuangan yang akan berdampak pada pendapatan BUMDES. Kegiatan: Peningkatan Kapasitas BUMDES Volume : 1Kegiatan Anggaran:Rp.21.200.000	Diakomodir dalam renja SKPD tapi sifatnya hanya Pembinaan dan Pemberdayaan terhadap BUMDesa.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINSOSPMD

Rencana Kerja disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan Kabupaten Pangandaran Khususnya Urusan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai pedoman taktis dalam penyelenggaraan, pengelolaan serta pelayanan Publik.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RKP 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025-2029, dan merupakan tahap pertama pembangunan dari pelaksanaan RPJPN 2025- 2045. RKP 2026 dan RPJMN 2025-2029 ini menjadi fondasi penting dalam mencapai sasaran dan target RPJPN 2025-2045, menuju Visi Indonesia Emas 2045. Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

Berdasarkan dari visi diatas, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang terdiri atas transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola yang ditopang oleh 2 (dua) agenda landasan transformasi, yaitu supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia; dan ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda kerangka implementasi transformasi, yaitu pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta kesinambungan pembangunan. Kedelapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;

2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasidigital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;

3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif;

4. Memantapkan supermasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan;
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tatakelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan
8. Kesenambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Visi Presiden untuk periode 2025–2029 adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini memiliki makna bahwa pembangunan membutuhkan kerja sama dari seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan semangat yang sama, berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya, untuk menjadikan Indonesia setara dengan negara maju pada tahun 2045. Visi ini akan tercapai melalui Delapan Misi Presiden yang diuraikan dalam Delapan Asta Cita.

Asta Cita tersebut mencakup 17 program prioritas Presiden yang meliputi rencana pembangunan di berbagai sektor, serta langkah-langkah yang dikenal sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins). Semua upaya ini dirancang untuk mengatasi permasalahan dan tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur, dengan tujuan menciptakan struktur yang kuat untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

b. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan Visi RPJMD 2025-2029, yaitu “Jabar Istimewa, Lembur Diurus Kota Ditata”. Adapun tujuan dan sasaran pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, yang sekaligus menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer, dengan sasaran:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2. Terbentuknya individu, beragama, beretika, dan berbudaya;
3. Terbentuknya individu berintegritas dan taat hukum;
4. Terbentuknya individu berpengetahuan dan berwawasan; dan sekaligus menjadi tujuan dan sasaran
5. Terbentuknya individu kreatif dan cekatan.

Tujuan 2

Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan yang berdaya saing;
2. Meningkatnya Kinerja Perdagangan yang berkualitas;
3. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berbasis teknologi untuk swasembada pangan serta kesejahteraan petani/nelayan;
4. Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten;
5. Terkendalinya stabilitas ekonomi mikro; dan
6. Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing.

Tujuan 3

Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang berbasis lingkungan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya layanan infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan sekitar kawasan konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan; dan
2. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat

Tujuan 4

Terwujudnya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi, dengan sasaran:

1. Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan; dan
2. Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan.

Tujuan 5

Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan, dengan sasaran: Meningkatkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif.

c. Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Visi pembangunan daerah harus mampu mengatasi isu-isu strategis dan tantangan pembangunan di wilayah tersebut, serta dapat diselesaikan dalam periode waktu menengah. Visi pembangunan daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih saat pemilihan kepala daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil pembangunan dari RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2025-2029. Visi ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi berbagai masalah strategis di Kabupaten Pangandaran serta perkembangan pembangunan di beberapa tahun terakhir. Akibatnya, untuk mendukung kemajuan Kabupaten Pangandaran, beberapa masalah strategis harus dipertimbangkan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran, kebijakan strategis harus dibuat untuk mendukung masalah strategis tersebut. Adapun visi Kabupaten Pangandaran adalah: **Pembangunan Yang Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Wisata Pangandaran Mendunia Dengan Menitikberatkan Pada Pendidikan Agama Dan Karakter.**

Diharapkan melalui visi pembangunan Kabupaten Pangandaran selama lima tahun ke depan, semua pihak berwenang di Kabupaten Pangandaran dapat bekerja sama untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya dan kapasitas mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai upaya dalam mewujudkan misi pembangunan untuk mencapai visi. Dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025–2029, rumusan misi dibuat dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam proses pembangunan. Perlu diingat bahwa misi berfungsi sebagai pedoman (guidence) untuk: (i) mendorong fokus untuk pencapaian tujuan; (ii) memberikan dasar untuk pengalokasian sumber daya; (iii) menetapkan kerangka tanggung jawab organisasi; dan (iv) berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan tujuan organisasi.

Rumusan misi juga dapat berfungsi sebagai alat promosi, yaitu dapat menarik perhatian stakeholder (pemerintah, donasi, masyarakat, dll.) dan memberikan inspirasi kepada pihak terkait. Misi Kabupaten Pangandaran 2025–2029 disusun untuk memperjelas langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai visi periode 2025–2029. Misi pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Berikut ini penjelasan misi-misi Kabupaten Pangandaran tahun 2025-2029:

1. **Mempermudah Akses dan Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan**

Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat Pangandaran mendapatkan layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan berkualitas. Hal ini mencakup pembangunan fasilitas kesehatan yang lebih baik, peningkatan tenaga kesehatan, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. **Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan**

Fokus misi ini adalah memperbaiki dan memperkuat sistem pendidikan di Pangandaran. Ini bisa meliputi peningkatan kualitas pengajaran, peningkatan fasilitas pendidikan, pelatihan bagi tenaga pendidik, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman, tujuannya adalah menghasilkan generasi yang cerdas dan siap bersaing.

3. **Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berkelanjutan**

Misi ini berfokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat Pangandaran, seperti jalan, jembatan, sistem transportasi, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, infrastruktur yang dibangun harus ramah lingkungan dan berkelanjutan agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

4. **Mewujudkan Penataan Pariwisata yang Aman, Nyaman, dan Berkesinambungan**

Sebagai daerah yang dikenal dengan potensi wisata alamnya, Pangandaran berkomitmen untuk mengelola sektor pariwisata dengan cara yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Ini mencakup pengelolaan tempat wisata yang ramah lingkungan, pengaturan keamanan bagi wisatawan, serta menciptakan pengalaman wisata yang tidak merusak lingkungan namun tetap memberi keuntungan ekonomi.

5. **Meningkatkan Kualitas Keimanan, Ketaqwaan, dan Nasionalisme melalui Penguatan Pendidikan Agama dan Wawasan Kebangsaan**

Misi ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan di kalangan masyarakat Pangandaran. Hal ini dilakukan melalui penguatan pendidikan agama, kegiatan keagamaan, serta pemahaman tentang pentingnya rasa kebangsaan dan nasionalisme. Diharapkan, masyarakat dapat hidup harmonis dengan saling menghargai dan menjaga persatuan.

6. **Mewujudkan Kemandirian Ketahanan Pangan**

Dalam misi ini, Kabupaten Pangandaran berupaya untuk mencapai kemandirian dalam bidang pangan dengan memaksimalkan potensi pertanian dan perikanan lokal. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak hanya bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, tetapi mampu memenuhi kebutuhan pangan dari hasil produksi sendiri dengan kualitas yang baik dan berkelanjutan

7. **Meningkatkan Birokrasi yang Bersih da Melayani**

Misi ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pemerintahan di Kabupaten Pangandaran agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas birokrasi, pelayanan publik akan lebih efektif dan efisien, serta dapat memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat.

8. **Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian, serta Penguatan dan Pemberdayaan Desa**

Misi ini menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Pangandaran. Ini mencakup pemberdayaan desa-desa melalui program-program yang mendukung pengembangan ekonomi lokal, seperti pelatihan kewirausahaan, akses ke pembiayaan, dan pengembangan produk unggulan daerah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.

3.2. **Tujuan dan Sasaran Renja DINSOSPMD**

3.2.1 **Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dan bersifat idealistik, mengandung keinginan kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan penyusunan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran adalah

Tujuan dari pelayanan Dinas sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
2. Meningkatnya kesejahetraan masyarakat
3. Masyarakat Desa yang berdaya saing

3.1.2 **Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut, perlu ditetapkan tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Pangandaran, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait.

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSPMD
2. Meningkatnya Jaminan Sosial Bagi PPKS
3. Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi PPKS
4. Meningkatnya Kualitas SDM Pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial
5. Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas
6. Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan

DINSOSPMD mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Melaksanakan tugas dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya,

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kab. Pangandaran Tahun 2026 adalah sebagai berikut ;

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Pangandaran

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
						DINAS SOSIAL PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA				5,107,629,000				7,107,265,000
1						URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3,843,629,000				5,642,265,000
1	0					URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG SOSIAL				3,843,629,000				5,642,265,000
1	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/K OTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		85%	3,707,689,000			86%	3,740,807,312
							2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik		100%				100%	

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
							3. Cakupan layanan kepegawaian		100%				100%	
							4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		100%				100%	
1	0	0	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu		100%	10,000,000			100%	10,000,000
							2. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu		100%				100%	
1	0	0	2	01	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	5,000,000			2 Dokumen	5,000,000
1	0	0	2.	00	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Laporan	5,000,000			11 Laporan	5,000,000

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
1	0	0	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik		100%	2,729,467,312			100%	2,749,467,312
1	0	0	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	19 Orang/Bulan	2,729,467,312	[DANA KHUSUS] - PENDAPA TAN ASLI DAERAH		19 Orang/Bulan	2,749,467,312
1	0	0	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik		100%	45,000,000.00			100%	25,000,000.00
1	0	0	2	05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	50 Paket	20,000,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPA TAN ASLI DAERAH			
1	0	0	2	05	00 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamata n, Semua	1 Orang	5,000,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPA TAN ASLI DAERAH		1 Orang	5,000,000.00

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
								Kelurahan						
1	0	0	2	05	00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	2 Orang	15,000,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPA TAN ASLI DAERAH		2 Orang	15,000,000.00
1	0	0	2	05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	50 Orang	5,000,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPA TAN ASLI DAERAH		50 Orang	5,000,000.00
1	0	0	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik		100%	170,500,000.00			100%	180,500,000.00
1	0	0	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	1 Paket	3,000,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPA TAN ASLI DAERAH		1 Paket	3,000,000.00

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
1	0	0	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	47,000,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Paket	47,000,000.00
1	0	0	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	2,500,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Paket	2,500,000.00
1	0	0	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	2,000,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Paket	2,000,000.00
1	0	0	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	26,000,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH		12 Dokumen	26,000,000.00
1	0	0	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten/ Kota, Semua	12 Laporan	15,000,000.00			12 Laporan	15,000,000.00

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
								Kecamatan, Semua Kelurahan						
1	0	0	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	75,000,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH		12 Laporan	85,000,000.00
1	0	0	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi		100%	230,000,000			100%	230,000,000
1	0	0	2	07	00 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	230,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 unit	230,000,000
1	0	0	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan		100%	402,721,688			100%	425,840,000

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	
1	0	0	2	08	00	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	12 Laporan	2,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPA TAN ASLI DAERAH		12 Laporan	2,000,000
1	0	0	2	08	00	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	12 Laporan	60,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPA TAN ASLI DAERAH		12 Laporan	60,000,000
1	0	0	2	08	00	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	12 laporan	340,721,688	[DANA KHUSUS] - PENDAPA TAN ASLI DAERAH		12 Laporan	363,840,000
1	0	0	2	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi		100%	120,000,000			100%	120,000,000

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
1	0	0	2	09	00	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	50,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH		2 Unit 50,000,000
1	0	0	2	09	00	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Unit	60,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH		9 Unit 60,000,000
1	0	0	2	09	00	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Unit	5,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH		15 Unit 5,000,000
1	0	0	2	09	00	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	5,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Unit 5,000,000

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
1	0	0				PROGRAM PEMBERDAYA AN SOSIAL	Presentase meningkatnya peran PSKS dalam penyelenggaraa n kesejahteraan sosial		92%	20,000,000			94%	20,000,000
1	0	0	2.	03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kemampuan PSKS		104 orang	20,000,000			104 orang	20,000,000
							Jumlah partisipasi lembaga dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)		28 Lembaga				29 Lembaga	
1	0	0	2.	03	00 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	28 Lembaga	10,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPA TAN ASLI DAERAH		29 Lembaga	10,000,000

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
1	0	0	2.	03	00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	104 orang	10,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPA TAN ASLI DAERAH		104 orang	10,000,000
1	0	0				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial		91%	55,000,000			92%	1,303,356,000
1	0	0	2.	01	01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar yang dibina		1791 Orang	40,000,000			1791 Orang	1,293,356,000

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
1	0	0	2.	01	00	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	20 orang	20,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPA TAN ASLI DAERAH		20 orang	1,273,356,000
1	0	0	2.	01	00	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	1771 Orang	20,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPA TAN ASLI DAERAH		1771 Orang	20,000,000
1	0	0	2.	02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan	Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS yang dibina		50 KK	15,000,000			50 KK	10,000,000

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
						NAPZA di Luar Panti Sosial								
1	0	0	2.	02	00	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	50 Orang	5,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPA TAN ASLI DAERAH		50 Orang	10,000,000
1	0	0	2.	02	00	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPA TAN ASLI DAERAH [DANA KHUSUS]			

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
1	0	0				PROGRAM PERLINDUNGA N DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Keluarga Miskin yang Meningkat Kemampuanny a dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik		15%	40,000,000			15%	550,000,000
1	0	0	2.	02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang berhak mendapatkan Bantuan		1 dokumen	40,000,000			1 dokumen	550,000,000
1	0	0	2.	02	00 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	239.942 Orang	10,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPA TAN ASLI DAERAH		238.000 Orang	10,000,000

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
1	0	0	2.	02	00	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	10,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPA TAN ASLI DAERAH		10 Orang	20,000,000
1	0	0	2.	02	00	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	327 Orang	10,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPA TAN ASLI DAERAH, DBHCHT		327 Orang	10,000,000
1	0	0	2.	02	00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.000 Usulan	10,000,000			12.000 Usulan	510,000,000
1	0	0				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		100%	5,940,000			100%	13,101,688

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
							sehingga mampu Bertahan Hidup							
1	0	0	2.	02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk serta dibina		2 desa	5,940,000			2 desa	13,101,688
1	0	0	2.	02	00 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	61 Orang	5,940,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPA TAN ASLI DAERAH		61 Orang	13,101,688
1	0	0				PROGRAM PENGELOLAA N TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola		100%	15,000,000			100%	15,000,000
1	0	0	2.	01	01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan		1 taman makam	15,000,000			1 taman makam	15,000,000

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
1	0	0	2.	01	00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemilbaraannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	31 Makam	15,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPA TAN ASLI DAERAH		31 Makam	15,000,000
2						URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1,264,000,000				1,465,000,000
2	1	3				URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA				1,264,000,000				1,465,000,000
2	1	0				PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase penataan desa		2%	10,000,000			2%	10,000,000
2	1	0	2.	01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang di tata		2 desa	10,000,000			2 desa	10,000,000
2	1	0	2.	01	00	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Semua Kabupate n/ Kota, Semua	2 unit	10,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPA		2 unit	10,000,000

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
								Kecamatan, Semua Kelurahan			TAN ASLI DAERAH			
2	1	0				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa		4%	5,000,000			4%	10,000,000
2	1	0	2.	01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Desa		4 desa	5,000,000			4 desa	10,000,000
2	1	0	2.	01	00 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ n/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	5,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPA TAN ASLI DAERAH		1 dokumen	10,000,000
2	1	0				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH AN DESA	Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib		65%	50,000,000.00			65%	560,000,000.00
2	1	0	2	01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraa n Administrasi Pemerintahan Desa		93 desa	50,000,000.00			93 desa	560,000,000.00
2	1	0	2	01	00 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Semua Kabupaten/ n/ Kota, Semua	1 dokumen	5,000,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPA		1 dokumen	5,000,000.00

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
							Desa	Kecamatan, Semua Kelurahan			TAN ASLI DAERAH			
2	1	0	2	01	00 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	5,000,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 dokumen	10,000,000.00
2	1	0	2	01	00 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	186 orang	15,000,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH [DANA KHUSUS] - Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		186 orang	15,000,000.00
2	1	0	2	01	00 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	20,000,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 dokumen	520,000,000.00

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
2	1	0	2	01	00 13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	1 dokumen	5,000,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPA TAN ASLI DAERAH		1 dokumen	10,000,000.00
2	1	0				PROGRAM PEMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARAK AT AN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Lembaga Kemasyarakata n Desa yang aktif		100%	1,199,000,000			100%	885,000,000
2	1	0	2.	01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya	Jumlah lembaga kemasyarakata n yang dibina		5 lembaga	1,199,000,000			5 lembaga	885,000,000

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
						Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								
2	13	05	201	01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,139,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	75,000,000
2	13	05	201	01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan	1 Dokumen	10,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI		1 Dokumen	10,000,000

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
						dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	n, Semua Kelurahan			DAERAH			
2	1	0	2.	01	00	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	1 Laporan	10,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPA TAN ASLI DAERAH		1 Laporan	10,000,000
2	1	0	2.	01	00	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat"	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	3 Laporan	30,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPA TAN ASLI DAERAH		3 Laporan	780,000,000
2	1	0	2.	01	00	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga"	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPA TAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	10,000,000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINSOSPMD

Rencana Kerja disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan Kabupaten Pangandaran Khususnya Urusan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai pedoman taktis dalam penyelenggaraan, pengelolaan serta pelayanan Publik.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RKP 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025-2029, dan merupakan tahap pertama pembangunan dari pelaksanaan RPJPN 2025- 2045. RKP 2026 dan RPJMN 2025-2029 ini menjadi fondasi penting dalam mencapai sasaran dan target RPJPN 2025-2045, menuju Visi Indonesia Emas 2045. Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

Berdasarkan dari visi diatas, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang terdiri atas transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola yang ditopang oleh 2 (dua) agenda landasan transformasi, yaitu supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia; dan ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda kerangka implementasi transformasi, yaitu pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta kesinambungan pembangunan. Kedelapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.

Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;
2.

Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan

- ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif;
 4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan;
 5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;
 6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tatakelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
 7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan
 8. Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Visi Presiden untuk periode 2025–2029 adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini memiliki makna bahwa pembangunan membutuhkan kerja sama dari seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan semangat yang sama, berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya, untuk menjadikan Indonesia setara dengan negara maju pada tahun 2045. Visi ini akan tercapai melalui Delapan Misi Presiden yang diuraikan dalam Delapan Asta Cita.

Asta Cita tersebut mencakup 17 program prioritas Presiden yang meliputi rencana pembangunan di berbagai sektor, serta langkah-langkah yang dikenal sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins). Semua upaya ini dirancang untuk mengatasi permasalahan dan tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur, dengan tujuan menciptakan struktur yang kuat untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

b. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan Visi RPJMD 2025-2029, yaitu “Jabar Istimewa, Lembur Diurus Kota Ditata”. Adapun tujuan dan sasaran pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, yang sekaligus menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Cagur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer, dengan sasaran:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2. Terbentuknya individu, beragama, beretika, dan berbudaya;
3. Terbentuknya individu berintegritas dan taat hukum;
4. Terbentuknya individu berpengetahuan dan berwawasan; dan sekaligus menjadi tujuan dan sasaran
5. Terbentuknya individu kreatif dan cekatan.

Tujuan 2

Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan yang berdaya saing;
2. Meningkatnya Kinerja Perdagangan yang berkualitas;
3. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berbasis teknologi untuk swasembada pangan serta kesejahteraan petani/nelayan;
4. Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten;
5. Terkendalinya stabilitas ekonomi mikro; dan
6. Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing.

Tujuan 3

Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang berbasis lingkungan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya layanan infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan sekitar kawasan konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan; dan
2. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat

Tujuan 4

Terwujudnya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi, dengan sasaran:

1. Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan; dan
2. Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan.

Tujuan 5

Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan, dengan sasaran: Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif.

c. Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Visi pembangunan daerah harus mampu mengatasi isu-isu strategis dan tantangan pembangunan di wilayah tersebut, serta dapat diselesaikan dalam periode waktu menengah. Visi pembangunan daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih saat pemilihan kepala daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil pembangunan dari RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2025-2029. Visi ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi berbagai masalah strategis di Kabupaten Pangandaran serta perkembangan pembangunan di beberapa tahun terakhir. Akibatnya, untuk mendukung kemajuan Kabupaten Pangandaran, beberapa masalah strategis harus dipertimbangkan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran, kebijakan strategis harus dibuat untuk mendukung masalah strategis tersebut. Adapun visi Kabupaten Pangandaran adalah: **Pembangunan Yang Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Wisata Pangandaran Mendunia Dengan Menitikberatkan Pada Pendidikan Agama Dan Karakter.**

Diharapkan melalui visi pembangunan Kabupaten Pangandaran selama lima tahun ke depan, semua pihak berwenang di Kabupaten Pangandaran dapat bekerja sama untuk

meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya dan kapasitas mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai upaya dalam mewujudkan misi pembangunan untuk mencapai visi. Dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025–2029, rumusan misi dibuat dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam proses pembangunan. Perlu diingat bahwa misi berfungsi sebagai pedoman (guidence) untuk: (i) mendorong fokus untuk pencapaian tujuan; (ii) memberikan dasar untuk pengalokasian sumber daya; (iii) menetapkan kerangka tanggung jawab organisasi; dan (iv) berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan tujuan organisasi.

Rumusan misi juga dapat berfungsi sebagai alat promosi, yaitu dapat menarik perhatian stakeholder (pemerintah, donasi, masyarakat, dll.) dan memberikan inspirasi kepada pihak terkait. Misi Kabupaten Pangandaran 2025–2029 disusun untuk memperjelas langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai visi periode 2025–2029. Misi pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Berikut ini penjelasan misi-misi Kabupaten Pangandaran tahun 2025-2029:

1. **Mempermudah Akses dan Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan**

Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat Pangandaran mendapatkan layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan berkualitas. Hal ini mencakup pembangunan fasilitas kesehatan yang lebih baik, peningkatan tenaga kesehatan, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. **Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan**

Fokus misi ini adalah memperbaiki dan memperkuat sistem pendidikan di Pangandaran. Ini bisa meliputi peningkatan kualitas pengajaran, peningkatan fasilitas pendidikan, pelatihan bagi tenaga pendidik, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman, tujuannya adalah menghasilkan generasi yang cerdas dan siap bersaing.

3. **Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berkelanjutan**

Misi ini berfokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat Pangandaran, seperti jalan, jembatan, sistem transportasi, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, infrastruktur yang dibangun harus ramah lingkungan dan berkelanjutan agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

4. **Mewujudkan Penataan Pariwisata yang Aman, Nyaman, dan Berkesinambungan**

Sebagai daerah yang dikenal dengan potensi wisata alamnya, Pangandaran berkomitmen untuk mengelola sektor pariwisata dengan cara yang aman, nyaman, dan

berkelanjutan. Ini mencakup pengelolaan tempat wisata yang ramah lingkungan, pengaturan keamanan bagi wisatawan, serta menciptakan pengalaman wisata yang tidak merusak lingkungan namun tetap memberi keuntungan ekonomi.

5. **Meningkatkan Kualitas Keimanan, Ketaqwaan, dan Nasionalisme melalui Penguatan Pendidikan Agama dan Wawasan Kebangsaan**

Misi ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan di kalangan masyarakat Pangandaran. Hal ini dilakukan melalui penguatan pendidikan agama, kegiatan keagamaan, serta pemahaman tentang pentingnya rasa kebangsaan dan nasionalisme. Diharapkan, masyarakat dapat hidup harmonis dengan saling menghargai dan menjaga persatuan.

6. **Mewujudkan Kemandirian Ketahanan Pangan**

Dalam misi ini, Kabupaten Pangandaran berupaya untuk mencapai kemandirian dalam bidang pangan dengan memaksimalkan potensi pertanian dan perikanan lokal. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak hanya bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, tetapi mampu memenuhi kebutuhan pangan dari hasil produksi sendiri dengan kualitas yang baik dan berkelanjutan

7. **Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Melayani**

Misi ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pemerintahan di Kabupaten Pangandaran agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas birokrasi, pelayanan publik akan lebih efektif dan efisien, serta dapat memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat.

8. **Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian, serta Penguatan dan Pemberdayaan Desa**

Misi ini menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Pangandaran. Ini mencakup pemberdayaan desa-desa melalui program-program yang mendukung pengembangan ekonomi lokal, seperti pelatihan kewirausahaan, akses ke pembiayaan, dan pengembangan produk unggulan daerah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DINSOSPMD

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dan bersifat idealistik, mengandung keinginan kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan penyusunan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sedangkan sasaran merupakan

hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran adalah

Tujuan dari pelayanan Dinas sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
3. Masyarakat Desa yang berdaya saing

3.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut, perlu ditetapkan tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait.

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSPMD
2. Meningkatnya Jaminan Sosial Bagi PPKS
3. Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi PPKS
4. Meningkatnya Kualitas SDM Pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial
5. Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas
6. Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan

DINSOSPMD mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Melaksanakan tugas dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya,

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kab. Pangadaran Tahun 2026 adalah sebagai berikut ;

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Pangandaran

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
						DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				5,107,629,000				7,107,265,000
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3,843,629,000				5,642,265,000
1	0					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				3,843,629,000				5,642,265,000
1	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		85%	3,707,689,000			86%	3,740,807,312
							2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik		100%				100%	
							3. Cakupan layanan kepegawaian		100%				100%	
							4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		100%				100%	

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
1	0	0	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu		100%	10,000,000			100%	10,000,000
							2. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu		100%				100%	
1	0	0	2	01	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	5,000,000			2 Dokumen	5,000,000
1	0	0	2.0	000	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Laporan	5,000,000			11 Laporan	5,000,000
1	0	0	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik		100%	2,729,467,312			100%	2,749,467,312
1	0	0	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 Orang/Bulan	2,729,467,312	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH		19 Orang/Bulan	2,749,467,312

Kode						Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
1	0	0	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik		100%	45,000,000.00			100%	25,000,000.00
1	0	0	2	05	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	50 Paket	20,000,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPAT AN ASLI DAERAH			
1	0	0	2	05	000 6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	1 Orang	5,000,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPAT AN ASLI DAERAH		1 Orang	5,000,000.00
1	0	0	2	05	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	2 Orang	15,000,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPAT AN ASLI DAERAH		2 Orang	15,000,000.00

Rencana Kerja 2026

Kode						Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
1	0	0	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	5,000,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH		50 Orang	5,000,000.00
1	0	0	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik		100%	170,500,000.00			100%	180,500,000.00
1	0	0	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	3,000,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Paket	3,000,000.00
1	0	0	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	47,000,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Paket	47,000,000.00
1	0	0	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua	1 Paket	2,500,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI		1 Paket	2,500,000.00

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
								Kecamat an, Semua Keluraha n			DAERAH			
1	0	0	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	1 Paket	2,000,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPAT AN ASLI DAERAH		1 Paket	2,000,000.00
1	0	0	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	12 Dokumen	26,000,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPAT AN ASLI DAERAH		12 Dokumen	26,000,000.00
1	0	0	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	12 Laporan	15,000,000.00			12 Laporan	15,000,000.00

Rencana Kerja 2026

Kode						Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
1	0	0	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	12 Laporan	75,000,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPAT AN ASLI DAERAH		12 Laporan	85,000,000.00
1	0	0	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi		100%	230,000,000			100%	230,000,000
1	0	0	2	07	000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	1 unit	230,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPAT AN ASLI DAERAH		1 unit	230,000,000
1	0	0	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan		100%	402,721,688			100%	425,840,000
1	0	0	2	08	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	12 Laporan	2,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPAT AN ASLI DAERAH		12 Laporan	2,000,000

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
1	0	0	2	08	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	12 Laporan	60,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPAT AN ASLI DAERAH		12 Laporan	60,000,000
1	0	0	2	08	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	12 laporan	340,721,688	[DANA KHUSUS] - PENDAPAT AN ASLI DAERAH		12 Laporan	363,840,000
1	0	0	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi		100%	120,000,000			100%	120,000,000
1	0	0	2	09	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	2 Unit	50,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPAT AN ASLI DAERAH		2 Unit	50,000,000

Rencana Kerja

2026

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
1	0	0	2	09	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	9 Unit	60,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPAT AN ASLI DAERAH		9 Unit	60,000,000
1	0	0	2	09	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	15 Unit	5,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPAT AN ASLI DAERAH		15 Unit	5,000,000
1	0	0	2	09	000 9	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	1 Unit	5,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPAT AN ASLI DAERAH		1 Unit	5,000,000
1	0	0				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase meningkatnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		92%	20,000,000			94%	20,000,000

Rencana Kerja 2026

Kode						Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
1	0	0	2.0	03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kemampuan PSKS		104 orang	20,000,000			104 orang	20,000,000
							Jumlah partisipasi lembaga dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)		28 Lembaga				29 Lembaga	
1	0	0	2.0	03	000 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	28 Lembaga	10,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPAT AN ASLI DAERAH		29 Lembaga	10,000,000
1	0	0	2.0	03	001 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	104 orang	10,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPAT AN ASLI DAERAH		104 orang	10,000,000

Rencana Kerja

2026

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
							yang Meningkatkan Kapasitasnya							
1	0	0				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial		91%	55,000,000			92%	1,303,356,000
1	0	0	2.0	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar yang dibina		1791 Orang	40,000,000			1791 Orang	1,293,356,000
1	0	0	2.0	01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 orang	20,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH		20 orang	1,273,356,000

Rencana Kerja 2026

Kode						Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
1	0	0	2.0	01	000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1771 Orang	20,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH [DANA KHUSUS] - Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		1771 Orang	20,000,000
1	0	0	2.0	02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS yang dibina		50 KK	15,000,000			50 KK	10,000,000
1	0	0	2.0	02	000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	5,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH [DANA KHUSUS] - Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah		50 Orang	10,000,000

Rencana Kerja

2026

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
											h Daerah Provinsi			
1	06	04	2.02	02	0014	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH [DANA KHUSUS] - Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerinta h Daerah Provinsi			
1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik		15%	40,000,000			15%	550,000,000
1	06	05	2.02	02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang berhak mendapatkan Bantuan		1 dokumen	40,000,000			1 dokumen	550,000,000

Rencana Kerja 2026

Kode						Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
1	0	0	2.0	02	000 1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	239.942 Orang	10,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPAT AN ASLI DAERAH		238.000 Orang	10,000,000
1	0	0	2.0	02	000 4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	10 Orang	10,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPAT AN ASLI DAERAH		10 Orang	20,000,000
1	0	0	2.0	02	000 6	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	327 Orang	10,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPAT AN ASLI DAERAH, DBHCHT		327 Orang	10,000,000
1	0	0	2.0	02	000 8	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha	11.000 Usulan	10,000,000			12.000 Usulan	510,000,000

Rencana Kerja 2026

Kode						Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
								n						
1	0	0				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup		100%	5,940,000			100%	13,101,688
1	0	0	2.0	02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk serta dibina		2 desa	5,940,000			2 desa	13,101,688
1	0	0	2.0	02	000 2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	61 Orang	5,940,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPAT AN ASLI DAERAH		61 Orang	13,101,688
1	0	0				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola		100%	15,000,000			100%	15,000,000
1	0	0	2.0	01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam		1 taman makam	15,000,000			1 taman makam	15,000,000

Rencana Kerja 2026

Kode						Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
						Kabupaten/Kota	Pahlawan							
1	0	0	2.0	01	000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemiharaannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31 Makam	15,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH		31 Makam	15,000,000
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1,264,000,000				1,465,000,000
2	1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1,264,000,000				1,465,000,000
2	1	0				PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase penataan desa		2%	10,000,000			2%	10,000,000
2	1	0	2.0	01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang di tata		2 desa	10,000,000			2 desa	10,000,000
2	1	0	2.0	01	000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan	2 unit	10,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH		2 unit	10,000,000

Rencana Kerja 2026

Kode						Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
								an, Semua Kelurahan						
2	1	0				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa		4%	5,000,000			4%	10,000,000
2	1	0	2.0	01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Desa		4 desa	5,000,000			4 desa	10,000,000
2	1	0	2.0	01	000 1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	5,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 dokumen	10,000,000
2	1	0				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib		65%	50,000,000.00			65%	560,000,000.00
2	1	0				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		93 desa	50,000,000.00			93 desa	560,000,000.00
2	1	0				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamat	1 dokumen	5,000,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 dokumen	5,000,000.00

Kode						Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
								an, Semua Keluraha n						
2	1	0	2	01	000 4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	1 dokumen	5,000,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPAT AN ASLI DAERAH		1 dokumen	10,000,000.00
2	1	0	2	01	000 5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	186 orang	15,000,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPAT AN ASLI DAERAH [DANA KHUSUS] - Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerinta h Daerah Provinsi		186 orang	15,000,000.00
2	1	0	2	01	000 8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha	1 dokumen	20,000,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPAT AN ASLI DAERAH		1 dokumen	520,000,000.00

Rencana Kerja 2026

Kode						Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
								n						
2	1	0	2	01	001	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	5,000,000.00	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 dokumen	10,000,000.00
2	1	0				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif		100%	1,199,000,000			100%	885,000,000
2	1	0	2.0	01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina		5 lembaga	1,199,000,000			5 lembaga	885,000,000

Kode						Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
						dalam Daerah Kabupaten/Kota								
2	13	05	2.01	01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,139,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	75,000,000
2	13	05	2.01	01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	10,000,000

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
							Pendapatan Asli Desa	n						
2	1	0	2.0	01	000 6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	1 Laporan	10,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPAT AN ASLI DAERAH		1 Laporan	10,000,000
2	1	0	2.0	01	000 7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat"	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	3 Laporan	30,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPAT AN ASLI DAERAH		3 Laporan	780,000,000
2	1	0	2.0	01	000 9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga"	Semua Kabupate n/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	1 Dokumen	10,000,000	[DANA KHUSUS] - PENDAPAT AN ASLI DAERAH		1 Dokumen	10,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINSOSPMD

KABUPATEN PANGANDARAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Pangandaran. Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sebesar Rp. 3.707.689.000
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Adminitrasi Keunagan Perangkat Daerah sebesar Rp. 2.729.467.312

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 45.000.000

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

2. Pemulangan Pegawai yang Pensiun

3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 170.500.000

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4. Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
6. Fasilitas Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 230.000.000**
 1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 402.721.688**
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 120.000.000**
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Pemberdayaan Sosial sebesar Rp. 20.000.000**
 - a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 66.000.000**
 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 3. Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp. 55.000.000**
 - a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar Rp. 40.000.000**
 1. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat
 - b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial Sebesar Rp. 15.000.000**
 1. Pemberian Layanan Kedaruratan
 2. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
- 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 40.000.000**
 - a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 40.000.000**

1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
4. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
5. **Program Penanganan Bencana sebesar Rp. 5.940.000**
 - a. **Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp. 5.940.000**
 1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
6. **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebesar Rp. 15.000.000**
 - a. **Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota sebesar Rp. 15.000.000**
 1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
7. **Program Penataan Desa sebesar Rp. 10.000.000**
 - a. **Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa sebesar Rp. 10.000.000**
 1. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
8. **Program Peningkatan Kerjasama Desa sebesar Rp. 5.000.000**
 - a. **Fasilitasi Kerja sama antar Desa sebesar Rp. 5.000.000**
 1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
9. **Program Administrasi Pemerintahan Desa sebesar Rp.50.000.000**
 - a. **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa sebesar Rp. 500.000.000**
 1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
 2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 3. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 4. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
 5. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
10. **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat sebesar Rp. 1.199.000.000**
 - a. **Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.199.000.000**
 1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 3. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 4. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
 5. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 terdiri dari **10 Program** dan **17 Kegiatan** dan **46 Sub Kegiatan** dengan total anggaran sebesar **Rp. 5.107.629.000** Program dan Kegiatan Tersebut dilaksanakan oleh 2 Urusan yaitu Urusan Pemerintah Bidang Sosial sebesar **Rp. 3.843.629.000** dan Urusan Pemerinatah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar **Rp. 1.264.000.000** dan 5 Bidang yang ada di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu Bidang Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran disusun yang merupakan Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif selanjutnya akan terus dijabarkan kedalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah mengacu pada Visi, Misi, arah dan sasaran sehingga dapat dijadikan pedoman bagi seluruh kepentingan yang menjadi media untuk mensinergiskan arah, sasaran dan tahapan dalam melaksanakan Pembangunan, selanjutnya. yang nantinya akan dievaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Program/Kegiatan di masa yang akan datang. Sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan

Selain dari pada itu dalam penentuan keberhasilan pelaksanaan kegiatan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan komitmen para pemangku kepentingan, dari seluruh masyarakat guna tercapainya pelaksanaan kegiatan dalam Akan tetapi dalam menentukan keberhasilan, selain adanya penambahan anggaran biaya tambahan atau kegiatan transisi juga ditentukan oleh tingkat kepuasan masyarakat yang telah diberikan pelayanan atau semangat dan kualitas kerja para penyelenggara serta derajat jaringan kerja yang berhasil dibangun. Oleh karena itu prinsip penata kelolaan (governance) yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, efektivitas dan efisiensi perlu dijunjung tinggi sebagai rambu-rambu bagi setiap penanggung jawab dalam pelaksana program dan kegiatan.

Kiranya Rencana Kerja Perubahan ini dapat dijadikan acuan/pedoman di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran sehingga dapat berhasil guna, bermanfaat bagi kita semua dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 23 Juli 2025

Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pangandaran



Drs. TRISNO
NIP. 19740317 199311 1 001